



# **LAPORAN DELEGASI**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DALAM RANGKA MENGHADIRI *VIRTUAL MEETING OF  
COORDINATING COMMITTEE OF WOMEN PARLIAMENTARIANS OF  
ASEAN INTER PARLIAMENTARY ASSEMBLY (WAIPA)***

**PHNOM PENH - CAMBODIA, 30 AGUSTUS 2022**



**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**







# DAFTAR ISI

---

## PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- DASAR PENGIRIMAN DELEGASI
- SUSUNAN DELEGASI
- MAKSUD DAN TUJUAN
- PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS
- ANGGARAN

## ISI LAPORAN

- AGENDA PERTEMUAN
- JALANNYA PERTEMUAN

## PARTISIPASI DELEGASI

## KESIMPULAN DAN SARAN

- KESIMPULAN
- SARAN

## PENUTUP

- UCAPAN TERIMA KASIH
- KETERANGAN LAMPIRAN
- KATA PENUTUP







**L A P O R A N**  
**DELEGASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**DALAM RANGKA MENGHADIRI VIRTUAL MEETING OF COORDINATING**  
**COMMITTEE OF WOMEN PARLIAMENTARIANS OF ASEAN INTER**  
**PARLIAMENTARY ASSEMBLY (WAIPA)**

**Phnom Penh - Cambodia, 30 Agustus 2022**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pemulihan pandemi COVID-19 dan juga agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Women, Peace, and Security/WPS) telah disoroti oleh forum-forum regional seperti ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) karena dampak besarnya terhadap perempuan di kawasan dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan, dan untuk tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

Tidak dapat dipungkiri bahwa menempatkan kesetaraan gender di pusat pemulihan adalah pendekatan penting untuk menciptakan dunia yang inklusif. Jika tidak dilaksanakan, masyarakat hanya akan melihat ketimpangan sosial ekonomi yang lebih besar yang diperparah oleh pandemi COVID-19.

ASEAN *Comprehensive Recovery Framework* (ACRF/Kerangka Pemulihan Komprehensif ASEAN) juga mensyaratkan pendekatan pengarusutamaan gender dan *responsive gender* dalam kaitannya dengan rencana implementasinya di seluruh ASEAN. ACRF merupakan strategi yang terkonsolidasi bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menunjukkan tindakan terkoordinasi antar negara anggota beserta mitranya dalam mengatasi pandemi COVID-19.

ama halnya dengan agenda WPS, konflik yang terjadi di dunia kita saat ini telah membawa tantangan yang berat terhadap perempuan dan menunjukkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 terkait Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, diadopsi 22 tahun lalu, yang menggarisbawahi peran penting perempuan, termasuk partisipasi dan representasi dalam resolusi konflik dan proses perdamaian, masih sangat relevan.

Pada level nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mempunyai fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan, termasuk menerima aspirasi masyarakat, yang di mana sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang dapat berkontribusi pada kesetaraan gender dan



memecahkan isu-isu yang dihadapi oleh perempuan dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan.

DPR RI, melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) juga telah menyuarakan kesetaraan gender, termasuk pemberdayaan ekonomi di berbagai forum internasional antar-parlemen, seperti *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* dan AIPA. Dalam Sidang Umum tahunannya, AIPA juga telah mengadopsi resolusi yang mendukung kemajuan perempuan dalam politik, ekonomi dan seluruh bidang.

Sehubungan dengan hal tersebut, BKSAP DPR RI turut serta menghadiri *Coordinating Meeting of WAIPA* secara virtual di Tangerang, Banten pada tanggal 30 Agustus 2022 yang secara khusus membahas peran parlemen dalam mempromosikan pemulihan pandemi COVID-19 yang responsif akan gender, dan juga peran parlemen dalam memajukan agenda WPS.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya inspirasi dan pengetahuan tentang bagaimana para anggota parlemen berperan dalam memajukan hal agenda-agenda tersebut. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk berbagi situasi terkini mengenai perkembangan pencapaian dan upaya menyempurnakan kesetaraan gender di level kawasan.

## **B. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI**

Partisipasi Delegasi DPR RI dalam pertemuan “*The Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-parliamentary Assembly (WAIPA)*” pada tanggal 30 Agustus 2022 berdasarkan pada:

1. Keputusan Pimpinan BKSAP dalam rapat ke-32 tanggal 7 Juli 2022;
2. Surat Disposisi Pimpinan DPR RI dengan Nomor Agenda 541 mengenai Permohonan Izin dan Dukungan Anggaran Kegiatan BKSAP ke Daerah;
3. Surat Tugas Nomor 36/D/ST-PD.LN/BKSAP-KSR/8/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Perjalanan Dinas ke kota Tangerang Selatan, Banten dalam rangka kegiatan *Coordinating Committee Meeting of WAIPA*;

## **C. SUSUNAN DELEGASI**

Susunan Delegasi DPR RI ke pertemuan “*The Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Interparliamentary Assembly (WAIPA)*” pada tanggal 30 Agustus 2022, adalah sebagai berikut:





**Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos, MCOMN&MEDIAS**  
**Ketua Delegasi**  
**F-PDIP/A-262**  
**Anggota BKSAP | Anggota Komisi I**



**Agustina Wilujeng Pramestuti, SS**  
**F-PDIP/A-185**  
**Anggota BKSAP | Anggota Komisi X**



**Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc**  
**F-P Golkar/A-322**  
**Anggota BKSAP | Anggota Komisi VII**



**Ratih Megasari Singkaru, M.Sc**  
**F-P Nasdem/A-402**  
**Anggota BKSAP | Anggota Komisi X**

Selama persidangan berlangsung, Delegasi DPR RI didampingi oleh Pejabat/Staf Kementerian Luar Negeri RI, Pejabat/Staf Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Tenaga Ahli BKSAP.

## **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Maksud partisipasi Delegasi DPR RI pada pertemuan “*The Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA)*” yaitu:



- 1) Mendiskusikan bagaimana para anggota parlemen perempuan mengambil bagian sesuai fungsinya dalam memajukan pemulihan COVID-19 yang responsif akan gender, dan juga dalam memajukan agenda WPS;
- 2) Memperbarui informasi terkait kebijakan dan tindakan negara terkait kesetaraan gender; dan
- 3) Saling berbagi praktik terbaik terkait kebijakan dan tindakan serta hal-hal yang perlu disoroti selama Sidang Umum AIPA yang ke-43 pada bulan November tahun ini.

## 2. Tujuan

Adapun tujuan pertemuan WAIPA ini yaitu:

- 1) Mencatat dampak pandemi COVID-19 terhadap mata pencaharian perempuan dan anak perempuan serta menilai tanggapan dan mekanisme regional;
- 2) Terus memajukan Agenda WPS, yang diprakarsai oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 pada tahun 2000 dan memulai intervensi kebijakan untuk secara efektif mengimplementasikan Pernyataan Bersama tentang Mempromosikan Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di ASEAN oleh Para Pemimpin ASEAN pada tahun 2017;
- 3) Mengembangkan strategi inovatif menuju pemulihan yang berkelanjutan, inklusif dan tangguh melalui pemberdayaan perempuan dan anak perempuan;
- 4) Menjajaki cara-cara untuk meningkatkan kesetaraan partisipasi perempuan dalam politik, termasuk kemungkinan untuk meningkatkan jumlah minimum anggota parlemen perempuan yang berpartisipasi dalam Sidang Umum AIPA;
- 5) Meminta masukan dari Parlemen Anggota AIPA untuk Rancangan Resolusi yang akan diajukan pada Rapat Komite WAIPA dari Sidang Umum AIPA ke-43.

## E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Serangkaian kegiatan dilakukan dalam rangka persiapan Delegasi DPR RI berpartisipasi dalam pertemuan virtual “*The Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA)*”, baik dalam hal teknis maupun substansi.



Guna kelancaran tugas Delegasi dari segi teknis, Sekretariat BKSAP mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung berlangsungnya kegiatan. Sementara dari segi substansi, Sekretariat bersama Tenaga Ahli telah menyusun presentasi, point of intervention, dan materi pendukung lainnya terkait topik agenda yang dibahas.

## **G. ANGGARAN**

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Dewan dengan biaya penyelenggaraan sebesar Rp.136.449.000,- (*Seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).

## **II. ISI LAPORAN**

### **A. AGENDA PERTEMUAN**

08.30 A.M. - OPENING CEREMONY

08.50 A.M. Welcome and Opening Remarks by Hon Kittisanghakbindit Khuon Sudary, Second Vice-President of the National Assembly of Cambodia and Chairperson of WAIPA and Chair of the meeting

08.50 A.M. - FIRST SESSION

10.15 A.M. Moderated by Hon.Mrs. Lork Kheng, Chairperson of Commission on Public Health, Social Work, Veteran, Youth Rehabilitation, Labor, Vocational Training and Women's Affairs of the National Assembly of the Kingdom of Cambodia

08.50 A.M. - Introduction of Delegations

09.00 A.M.

9.00 A.M. – ➤ Presentation “How COVID-19 has affected women’s right to health” by Dr. Lison Guignard, Programme Manager of Gender Equity and Human Rights-Based Approach, Parliamentary Centre of Asia

10.15 A.M. ➤ Discussion on “Roles of Parliaments in promoting gender-responsive recovery from the COVID-19 Pandemic

Panelist:

- Hon. Mrs. Dyah Roro Esti Widya Puteri, Member of The House of Representatives of the Republic of Indonesia (7 mins)

- Hon. Dato' Sri Rohani Abd Karim, Member of the Parliament of Malaysia (7 mins)
- Hon. Ms. Wilailuck ARINTHAMAPONG, Member of the House of Senate of the Kingdom of Thailand (7 mins)

Discussion

10.30 AM - SECOND SESSION

11.45 AM Moderated by Hon.Mrs. Lork Kheng, Chairperson of Commission on Public Health, Social Work, Veteran, Youth Rehabilitation, Labor, Vocational Training and Women's Affairs of the National Assembly of the Kingdom of Cambodia

- Presentation on "Impacts of conflicts and wars in advancing the Women, Peace and Security agenda" by Dr. Chheang Vannarith, President of the Asian Vision Institute (AVI)
- Discussion on "Roles of Parliaments in advancing the Women, Peace and Security agenda"

- Panelist:

- Hon. Ms. Agustina Wilujeng Pramestuti, Member of The House of Representatives of the Republic of Indonesia (7 mins)
- Hon. Ms. Silumpa LERTNUWAT, Member of the House of Representatives of the Kingdom of Thailand (7mins)
- Hon. Mr. Ty Sokun, Member of Parliament, Secretary of the Commission on Foreign Affairs, International Cooperation, Information and Media of the National Assembly of the Kingdom of Cambodia (7 mins)

Discussion

11.45 AM - CLOSING CEREMONY

- 12.15 PM
- Wrap Up by Hon.Mrs. Nguyen Tuong Van, Secretary General of AIPA
  - Closing remarks by Hon. Mrs. Lork Kheng, Chairperson of Commission on Public Health, Social Work, Veteran, Youth Rehabilitation, Labor, Vocational Training and Women's Affairs of the National Assembly of the Kingdom of Cambodia



## B. JALANNYA PERTEMUAN

Pertemuan “*The Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA)*” yang diselenggarakan secara virtual pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, dihadiri oleh 6 (enam) Parlemen Anggota AIPA (Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Thailand, dan Viet Nam) serta 2 (dua) Parlemen sebagai Observer (Brunei Darussalam dan Filipina) secara virtual. Selain itu pertemuan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal AIPA dan perwakilan dari *Parliamentary Centre of Asia* dan *Asian Vision Institute*.

### Opening Ceremony

*Opening Ceremony* dibuka pada hari Selasa, 30 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB diawali dengan pidato pembukaan oleh **Kittisanghakbindit Khuon Sudary** selaku *Second Vice-President of the National Assembly of Cambodia and Chairperson of WAIPA and Chair of the Meeting*.

Secara menyeluruh, Kittisanghakbindit Khuon Sudary dalam pidatonya menyampaikan secara rinci agenda dari pertemuan, dan menyampaikan pentingnya peran, partisipasi dan representasi perempuan di dalam dunia politik.

Kittisanghakbindit Khuon Sudary, juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan perspektif perempuan yang harus menjadi pusat dari setiap kebijakan. Hal tersebut merupakan bagian dari solusi untuk memecahkan tantangan yang dihadapi perempuan, termasuk dalam pemulihan pandemi COVID-19, dan dalam mengatasi serta mencegah konflik yang dapat berkontribusi pada perdamaian di tingkat kawasan dan dunia.

### First Session

Sesi pertama dengan moderator **Lork Kheng** (*Chairperson of Commission on Public Health, Social Work, Veteran, Youth Rehabilitation, Labor, Vocational Training and Women’s Affairs of the National Assembly of the Kingdom of Cambodia*) diawali dengan presentasi tentang “*How COVID-19 has affected women’s right to health*” oleh **Dr. Lison Guignard** selaku *Programme Manager of Gender Equity and Human Rights-Based Approach, Parliamentary Centre of Asia*.

Dr. Lison Guignard menyampaikan bahwa kekerasan berbasis gender (*Gender Based Violence-GBV*) telah meningkat selama pandemi COVID-19. Selain itu,

70% dari tenaga kesehatan di dunia adalah perempuan, akan tetapi kurang 1 dari 5 ahli yang ikut serta merespon atau mengatasi pandemi adalah perempuan. Adapun tantangan lainnya seperti akses pada layanan kesehatan yang esensial. Anggota parlemen di WAIPA juga dijelaskan memiliki peran yang krusial dalam bidang pengawasan dan penegakkan hukum serta peraturan dalam mengatasi GBV. Di antara isu lainnya; mempromosikan kesetaraan gender; dan pemulihan yang bermanfaat bagi seluruh manusia.

Setelah presentasi dari Dr. Lison Guignard, sesi pertama dilanjutkan dengan presentasi terkait “*Roles of Parliaments in promoting gender-responsive recovery from the COVID-19 Pandemic*” yang disampaikan oleh beberapa panelis, yaitu:

- **Dyah Roro Esti Widya Puteri**, Anggota BKSAP dan Komisi VII DPR RI
- **Dato' Sri Rohani Abd Karim**, *Member of the Parliament of Malaysia*
- **Wilailuck Arinthamapong**, *Member of the House of Senate of the Kingdom of Thailand*

Dalam presentasinya, Dato' Sri Rohani Abd Karim menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan selama pandemi COVID-19 baik dari segi sosial maupun ekonomi, dan juga pentingnya peran dan representasi perempuan untuk memastikan bahwa agenda WPS dapat dicapai. Kerja sama antar negara di kawasan dan secara global diharapkan diperkuat untuk memajukan agenda-agenda tersebut.

Adapun Wilailuck Arinthamapong dalam presentasinya menjabarkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang sangat terdampak saat pandemi COVID-19, contohnya banyak perempuan yang kehilangan pekerjaan. Pandemi secara luas juga berdampak pada pembangunan ekonomi dan sosial. Perempuan mempunyai peran yang krusial dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perancangan undang-undang. Sehubungan dengan ini, parlemen juga harus memastikan partisipasi perempuan karena efeknya yang besar dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan.

### **First Session: Further Discussion**

Pada sesi selanjutnya, dilaksanakan diskusi untuk tanya jawab atau menyampaikan pendapat terhadap topik yang telah dipresentasikan oleh *keynote speaker* dan Panelis.

Pada kesempatan ini, Anggota Parlemen Vietnam, Nguyen Thanh Cam, menyampaikan pentingnya mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dalam tindakan dan kebijakan. Ia juga menyampaikan bahwa kekerasan dalam



rumah tangga meningkat. Selain itu, banyak bisnis atau perusahaan yang rugi selama pandemi. Nguyen Thanh Cam lebih lanjut menjelaskan bahwa pengawasan terhadap kebijakan terkait pemulihan pandemi COVID-19 merupakan bagian yang penting untuk dilaksanakan. Pada level regional dan global, penting untuk berbagi pengalaman untuk menciptakan solusi atau strategi sosial dan ekonomi yang inklusif, dan mempromosikan kerja sama bilateral dan regional.

Anggota delegasi dari Parlemen Kamboja juga menyampaikan pandangannya bahwa kerja sama antar negara merupakan hal yang penting untuk memecahkan masalah dan demi pemulihan pandemi COVID-19 yang bermanfaat bagi seluruh rakyat. Dalam hal ini, dialog dan berbagi pengalaman harus dijadikan salah satu strategi untuk memperkuat dan memberdayakan perempuan, termasuk anggota parlemen perempuan.

### **Second Session**

Sesi kedua dimoderatori oleh **Lork Kheng** (*Chairperson of Commission on Public Health, Social Work, Veteran, Youth Rehabilitation, Labor, Vocational Training and Women's Affairs of the National Assembly of the Kingdom of Cambodia*), dan dibuka dengan presentasi tentang "*Impacts of Conflicts and Wars in Advancing the Women, Peace and Security Agenda*" oleh **Dr. Chheang Vannarith**, *President of the Asian Vision Institute*.

Dalam presentasinya, Dr. Chheang Vannarith menyampaikan kurangnya implementasi dari undang-undang, dan pentingnya kemauan, komitmen dan kerja sama untuk memecahkan masalah perempuan di area konflik. Adapun beberapa tantangan seperti norma gender patriarki dan kendala sosial-politik yang dihadapi oleh perempuan untuk berpartisipasi. Anggota parlemen perempuan mempunyai peran yang krusial, apa lagi mereka juga dapat memahami lebih dalam terkait dampak dari perang dan konflik terhadap perempuan. Pada level regional, diperlukan juga *regional action plan* yang efektif; koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan pengarusutamaan WPS dalam pilar *ASEAN Community*.

Setelah presentasi dari Dr. Chheang Vannarith, sesi kedua pertemuan dilanjutkan oleh presentasi tentang "*Roles of Parliaments in Advancing the Women, Peace and Security Agenda*" oleh beberapa panelis, yaitu:

- **Agustina Wilujeng Pramestuti**, Anggota BKSAP dan Komisi 10 DPR RI
- **Silumpa Lertnuwat**, *Member of the House of Representatives of the Kingdom of Thailand*

- **Ty Sokun**, *Member of Parliament, Secretary of the Commission on Foreign Affairs, International Cooperation, Information and Media of the National Assembly of the Kingdom of Cambodia (7 mins)*

Silumpa Lertnuwat menjabarkan pentingnya keterlibatan perempuan untuk perdamaian dan keamanan. Dalam hal ini, parlemen perlu untuk lebih lanjut memperjuangkan dan mempromosikan kesetaraan gender. Selain itu, anggaran perlu digunakan secara efektif, dan perlunya pengawasan terhadap badan pemerintah dalam agenda WPS. Yang tidak kalah penting, masyarakat juga harus diberi kesempatan untuk bersuara dan diikutsertakan dalam pembahasan terkait WPS. Disampaikan juga bahwa kerjasama yang meletakkan WPS sebagai agenda prioritas juga harus menjadi hal yang harus dilaksanakan secara kolektif.

Ty Sokun sebagai panelis terakhir juga menjelaskan perlunya memecahkan tantangan yang menghalangi peran perempuan. Selain itu, partisipasi aktif perempuan, termasuk keikutsertaan mereka dalam anggaran pada level nasional juga merupakan hal yang esensial untuk memajukan agenda WPS dan kesetaraan gender. Melalui presentasinya, Ty Sokun juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama antar negara dalam hal berbagi pengalaman terkait agenda WPS.

### **Second Session: Further Discussion**

Pada sesi ini juga dilaksanakan diskusi berupa tanya jawab atau penyampaian pendapat terhadap topik yang telah disampaikan.

Anggota parlemen Vietnam, Le Thu Ha, menyampaikan pentingnya peran perempuan dalam proses perdamaian, dan juga pentingnya mengimplementasi agenda dan perjanjian-perjanjian internasional. Sehubungan dengan ini, Vietnam berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan untuk perdamaian. Beberapa tantangan pun dijabarkan oleh Le Thu Ha, terutama terkait kekerasan berbasis gender dan kemiskinan di antara isu lainnya yang berdampak negatif pada perempuan.

Anggota parlemen Vietnam tersebut juga memberikan saran terkait pentingnya memperkuat perempuan dari segi ekonomi, edukasi, dan di dalam dunia politik. Selain itu, kerja sama dan koordinasi antar negara di kawasan yang fokus terhadap pelatihan dan mencakup aktivitas-aktivitas terkait topik pembangunan perdamaian juga perlu diperkuat dan dilaksanakan lebih lanjut.



### Closing Ceremony

Pada penutupan pertemuan, *Secretary General of AIPA*, **Nguyen Tuong Van** menyampaikan apresiasinya terhadap para anggota parlemen yang telah hadir, dan juga terkait pentingnya peran, termasuk partisipasi dan representasi perempuan. Ia juga kembali mengingatkan bahwa akan adanya Sidang Umum ke-43 AIPA pada bulan November tahun ini, yang diharapkan akan berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan terkait.

Selanjutnya, Lork Kheng selaku *Chairperson of Commission on Public Health, Social Work, Veteran, Youth Rehabilitation, Labor, Vocational Training and Women's Affairs of the National Assembly of the Kingdom of Cambodia*, menjelaskan pentingnya tindakan untuk mempromosikan kesehatan public dan juga menjabarkan pentingnya meningkatkan representasi dan partisipasi perempuan untuk memperkuat agenda WPS. Lork Kheng juga berharap akan adanya banyak anggota parlemen perempuan yang akan hadir pada Sidang Umum ke-43 AIPA pada bulan November nanti.

### III. PARTISIPASI DELEGASI

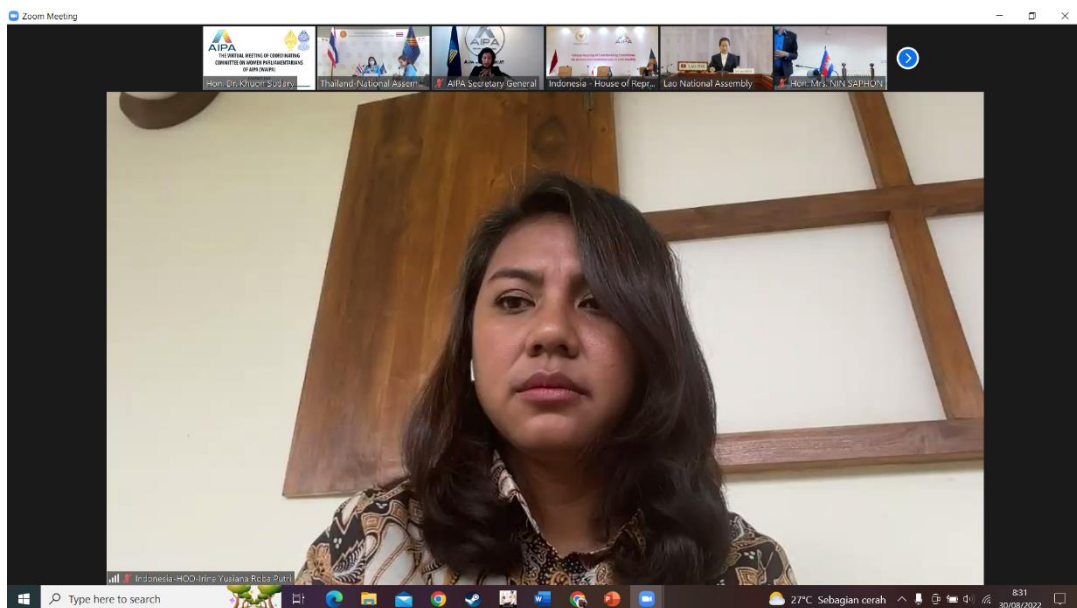
Anggota-anggota Parlemen Perempuan BKSAP DPR RI hadir dan berkontribusi aktif pada *Virtual Meeting of Coordinating Committee on WAIPA* baik sebagai *panelis* maupun menyampaikan pendapat atau tanggapan pada setiap sesi yang berlangsung.



Pada Sesi Pertama, Delegasi Perempuan **Dyah Roro Esti Widya Puteri** dari Fraksi Partai Golkar selaku panelis, dalam presentasinya menjabarkan bahwa anggota parlemen perempuan memiliki peran dalam merumuskan kebijakan yang responsif

akan gender melalui fungsi legislatif, penganggaran dan pengawasan, termasuk mengunjungi daerah pemilihan dan melalui Rapat Dengar Pendapat dengan pemerintah. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang lebih banyak di parlemen mengarah pada perhatian yang lebih kuat terhadap isu-isu yang mempengaruhi perempuan.

Indonesia telah mengadopsi dan mengimplementasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini bertujuan untuk mendorong pemulihan di berbagai sektor dengan tetap mengutamakan keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi. Hal tersebut juga mencakup Kredit Usaha Rakyat/KUR, insentif bagi tenaga kesehatan, Program vaksinasi, Kartu Prakerja, dan Program Keluarga Harapan, di antara lainnya. Pada level regional dan global, BKSAP juga akan terus memperjuangkan untuk implementasi yang efektif terkait Kerangka Pemulihan Komprehensif ASEAN (ASEAN Comprehensive Recovery Framework/ACRF) dan Rencana Implementasinya; Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Funds/FIF), serta memecahkan masalah dan tantangan yang dihadapi perempuan selama pandemi, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.



Pada sesi diskusi, **Irine Yusiana Roba Putri** dari Fraksi PDI-Perjuangan, selaku *Vice-Chair* WAIPA dan Anggota BKSAP DPR RI, menyampaikan pendapatnya bahwa kesehatan fisik dan mental adalah hak asasi setiap manusia. Dalam hal ini, kesehatan mental harus diintegrasikan dalam langkah-langkah perlindungan kesehatan atau sosial negara. Para anggota parlemen, harus memastikan, melalui fungsi legislatif, penganggaran dan pengawasannya bahwa kebijakan pemerintah dan langkah-langkah lainnya memasukkan prinsip-prinsip keterjangkauan dan aksesibilitas. Hal ini juga harus disuarakan lebih lanjut secara kolektif dalam Sidang Umum ke-43 AIPA yang akan diadakan pada bulan November tahun ini.





Pada Sesi Kedua, Delegasi Perempuan **Agustina Wilujeng Pramestuti** dari Fraksi PDI-Perjuangan selaku panelis menyampaikan bahwa partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pencegahan, pengelolaan dan penyelesaian konflik adalah kunci untuk pelaksanaan SDGs dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Pada level nasional, Indonesia, hingga Mei 2022, menyumbang setidaknya 149 perempuan penjaga perdamaian yang bertugas di sejumlah Misi Perdamaian PBB. Selain itu, Indonesia memprakarsai pembentukan *South East Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediators* untuk memajukan WPS di kawasan Asia Tenggara, dan juga mempunyai Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.



Pada sesi diskusi, **Ratih Megasari Singkarru** dari Fraksi Partai Nasdem memberikan pandangannya terkait perempuan di area konflik. Meskipun ada larangan keras terhadap kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender dalam

hukum HAM internasional, perbuatan sangat tercela semacam itu tetap menjadi tantangan bagi perempuan di daerah konflik atau zona perang. Kekerasan seksual atau berbasis gender mempunyai dampak yang sangat negatif kepada korban, terutama kesehatan fisik dan mental mereka. Selanjutnya, hal itu juga dapat menurunkan produktivitas dan mempengaruhi perekonomian. Indonesia berharap WAIPA dapat berkontribusi dalam memastikan lingkungan yang aman dan terjamin bagi perempuan di zona konflik, dan melindungi hak asasi mereka, termasuk hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.



DPR RI melalui BKSAP juga akan terus melakukan memperjuangkan beberapa hal, termasuk dalam forum-forum regional seperti terkait pengadopsian dan implementasi ASEAN *Regional Plan of Action on Women, Peace and Security* (RPA on WPS), mencegah dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh perempuan di daerah konflik, termasuk pemindahan massal dan kekerasan seksual, melalui resolusi internasional dan regional yang relevan; penganggaran yang memadai yang berfokus pada peningkatan peran dan kontribusi perempuan di daerah konflik.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. KESIMPULAN

1. Pertemuan “*The Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA)*” telah terselenggara secara virtual dengan lancar dan sukses, dihadiri oleh para Anggota Parlemen dari 6 negara AIPA yaitu Cambodia, Indonesia, Lao, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Sedangkan 2 negara (Philippines dan Brunei Darussalam) hadir sebagai Observer.



2. Kehadiran Delegasi Indonesia dalam pertemuan “*Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA)*” ini menjadi cukup penting karena Indonesia melalui Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP/A-262) saat ini menjabat sebagai *Vice Chair of the Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA)*”
3. Pertemuan virtual “*Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA)*”, membahas dua (2) tema presentasi para panelis dan dua (2) usulan judul Draft Resolusi.
4. Dua tema presentasi para panelis yaitu “*How COVID-19 has affected women’s right to health*” dan “*Impacts of conflicts and wars in advancing the Women, Peace and Security agenda*”.
5. Dua usulan judul Draft Resolusi yaitu “*Roles of Parliaments in promoting gender-responsive recovery from the COVID-19 Pandemic*” dan “*Roles of Parliaments in advancing the Women, Peace and Security agenda*”
6. Melalui pertemuan virtual “*Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA)*”, para anggota BKSAP DPR RI yang hadir dapat menyampaikan pandangan dan strateginya terkait apa yang perlu dilakukan di level nasional dan regional untuk mencapai pemulihan COVID-19 yang responsif akan gender dan juga agenda WPS.
7. Para delegasi DPR RI juga mendapat wawasan dan informasi mengenai strategi atau tindakan yang dilaksanakan oleh negara ASEAN lainnya terkait pemulihan COVID-19 dan juga agenda WPS.
8. Pentingnya untuk seluruh anggota parlemen di perempuan di kawasan ASEAN untuk memperkuat kerja sama dalam bidang kesetaraan gender, khususnya terkait kebijakan pemulihan COVID-19 dan juga keamanan.

## **B. SARAN**

1. *Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA)*” sebaiknya secara berkelanjutan mengangkat isu dan mengarusutamakan kesetaraan gender pada level nasional melalui tugas dan fungsi legislatif, anggaran dan juga pengawasan; dan juga pada level international, melalui dukungan terhadap resolusi-resolusi yang relevan.

2. Menjadikan aspirasi, saran dan pengalaman dari anggota parlemen negara ASEAN lainnya sebagai pembelajaran dan contoh yang mungkin dapat dilaksanakan di dalam negeri.
3. BKSAP untuk memasukan *point-point* penting terkait tugasnya di Parlemen untuk persiapan pertemuan Sidang Umum AIPA yang ke-43 pada bulan November tahun ini.
4. BKSAP perlu segera melakukan persiapan teknis dan substansi untuk penyelenggaraan pertemuan *Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA)* pada tahun 2023 dimana Indonesia akan menjabat sebagai Ketua WAIPA dan juga Presiden AIPA.

## V. PENUTUP

### A. UCAPAN TERIMA KASIH

Delegasi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Parlemen Kamboja selaku tuan rumah penyelenggara *The Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA)*”, PCAsia dan Sekretariat AIPA yang telah memfasilitasi kegiatan virtual ini, serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia yang telah membantu menyiapkan materi/substansi.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sekretariat dan semua pihak yang mendukung kelancaran pelaksanaan partisipasi Delegasi DPR RI dalam pertemuan ini.

### B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran materi dan hasil-hasil pertemuan sebagai berikut:

- 1) *Report of the Meeting of Coordinating Committee of WAIPA*
- 2) *Concept Note*
- 3) Presentasi Delegasi pada *First & Second Sessions*
- 4) *Press Release*
- 5) Dokumentasi Foto

### C. KATA PENUTUP

Demikianlah Laporan Delegasi DPR RI ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kinerja Delegasi DPR RI pada pertemuan “*Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA)*” yang dilaksanakan secara *virtual* dari Parlemen Kamboja di Phnom Penh – Kamboja pada tanggal 30 Agustus 2022  
Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 31 Agustus 2022

a.n. Delegasi  
Ketua Delegasi,

**Irine Yusiana Roba Putri, MCOMN&MEDIAS**  
A-262







# DAFTAR LAMPIRAN

---

- *Report of the Meeting of Coordinating Committee of WAIPA*
- *Concept Note*
- *Presentasi Delegasi pada First and Second Sessions*
- *Press Release*
- **Dokumentasi Foto**









**THE 43<sup>RD</sup> GENERAL ASSEMBLY  
ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY  
20-25 NOVEMBER 2022  
Phnom Penh, Cambodia**

*Advancing Together for Sustainable, Inclusive, and Resilient ASEAN*

---

*(Res 43GA/2022/WAIPA/01)*

**RESOLUTION ON**

**THE ADOPTION OF THE REPORT OF THE MEETING OF THE  
COORDINATING COMMITTEE OF WOMEN PARLIAMENTARIANS  
OF AIPA (WAIPA)**

***The Forty-Third AIPA General Assembly:***

***Recalling*** the Resolution 19WC-GA/W/98/01 on the *Formation of the Women Parliamentarians of AIPO*, Resolution 19WC-GA/W/98/02 on *Rules of Procedure of Women Parliamentarians of AIPO*, and Resolution RES.37GA/2016/ WAIPA/01 on the *Amendments to the Rules of Procedure of Women Parliamentarians of AIPO*;

***Noting*** that Women Parliamentarians of AIPA is the only standing committee that has its own rules of procedure (RoP), regulating how WAIPA must operate to carry out its functions;

***Bearing in mind*** that the current RoP of WAIPA regulates the terms of office of the Chairperson and Vice Chairperson of WAIPA, as well as the implementation of the meeting of the Coordinating Committee which precedes the WAIPA Committee meeting during the General Assembly;

***Recognizing*** that the meeting of the Coordinating Committee of WAIPA was held via videoconference on 30 August 2022 to discuss the *“Roles of Parliaments in Promoting Gender-responsive Recovery from the COVID-19 Pandemic”* and *“Roles of Parliaments in Advancing Women, Peace and Security Agenda”*;

***Taking note*** that one of the objectives of the meeting of the Coordinating Committee is to solicit inputs from AIPA Member Parliaments for the Draft Resolutions to be tabled at the WAIPA Committee of the 43<sup>rd</sup> AIPA General Assembly;

***Commending*** the hosting of the meeting of the Coordinating Committee of WAIPA by the National Assembly of the Kingdom of Cambodia;

***Expressing great appreciation to*** the Coordinating Committee of WAIPA for their valuable contribution towards the development and growth of WAIPA as a platform to encourage women's participation in decision-making processes at the regional level.

***Hereby Resolves to:***

***Adopt*** the Report of the meeting of the Coordinating Committee of WAIPA chaired by Hon. Kittisahangkbindit Khuon Sudary, Vice President of the National Assembly of the Kingdom of Cambodia, on 30 August 2022 via videoconference.

Adopted on the Twenty-third Day of November 2022 in Phnom Penh, Cambodia.

---



**CONCEPT NOTE**  
**The Meeting of Coordinating Committee**  
**on Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)**



**30 August 2022**

**CAMBODIA**

---

***BACKGROUND AND RATIONALE***

The COVID-19 pandemic has exposed the vulnerabilities of ASEAN- from public health and social protection to inequalities- and challenged ASEAN’s unity and centrality.

The pandemic has inflicted disproportionate adversity on women and girls which exacerbate the existing gender inequalities and other social and economic issues. Regional response to COVID-10 pandemic is essential in terms of political commitment, policy coordination, and resource mobilisation and alignment.

In the context of socio-economic recovery from the pandemic, ASEAN has taken measures to promote an inclusive and green recovery, and the promotion of community resilience amidst adversity. Helping the most vulnerable groups to cope with the crisis is one of the key policy areas including promoting a gender-responsive socio-economic recovery.

Women’s participation in decision making at all phases is critical towards realising the ASEAN Comprehensive Recovery Framework which focusing on enhancing health systems, strengthening human security, maximizing the potential of intra-ASEAN market and broader economic integration, accelerating inclusive digital transformation, and advancing towards a more sustainable and resilient future.

Indeed, the equal participation and equal access to basic social services and opportunities, can improve civic engagement, good governance and sustainable peace and development. In addition, increasing the number of women in positions of decision-making, and the means of exchanging reliable information amongst various stakeholders, is likely also to improve the gender responsiveness of crisis preparation and management policies and their implementation, which is critical to improving overall socio-economic outcomes and alleviate the effects of crises to the benefit of all citizens.

Within such context, the parliament plays increasingly significant role in promoting inclusive and sustainable recovery and achieving Sustainable Development Goals. By ensuring evidence-based and transparent budget allocation; providing accountability for government-led policy and law implementation; and integrating people’s voices throughout their processes to ensure that laws and policies leave no one behind and reach those that need them the most, Parliaments contribute to effective, accountable, and inclusive decision-making.



Despite complex and interconnected issues and challenges related to this pandemic, the cooperation for peace, security, sustainable development, and inclusive growth still prevails in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). This strong cooperative commitment aims to reduce gender inequalities, ensure peace and security and healthy economic development by addressing and promote women digital empowerment as well as an inclusive, sustainable and resilient recovery.

To expand upon these efforts, the WAIPA group, in collaboration with the Secretariat of AIPA and the Parliamentary Centre of Asia, will organise a coordination meeting among women parliamentarians from AIPA Member Parliaments to generate inputs for WAIPA 2022.

### ***EXPECTED RESULTS***

This workshop will be an opportunity to take stock of the impacts of the COVID-19 pandemic on the livelihoods of women, develop policy proposals to further consolidate and strengthen the implementation processes of AIPA's commitments to gender equality, transparency and accountability, promote inclusive and sustainable recovery, and advance the Women, Peace and Security Agenda at the national and regional levels.

### ***OBJECTIVES***

The coordination workshop aims to:

1. Take stock of the impacts of the COVI-19 pandemics on the livelihoods of women and girls and assess regional responses and mechanisms.
2. Continue to advance the Women, Peace, and Security Agenda which was initiated by the landmark UN Security Council Resolution 1325 in 2000 and initiate policy interventions to effectively implement the Joint Statement on Promoting Women, Peace, and Security in ASEAN by ASEAN Leaders in 2017.
3. Develop innovative pathways towards a sustainable, inclusive and resilient recovery through the empowerment of women and girls.
4. Explore ways to increase women's equal participation in politics, including the possibility to increase the minimum number of women parliamentarians participating in AIPA general assembly.
5. Solicit inputs from AIPA Member Parliaments for the Draft Resolutions to be tabled at the WAIPA Committee Meeting of the 43<sup>rd</sup> AIPA General Assembly.



## The Roles of Parliaments in Advancing Women, Peace and Security Agenda



**Hon. Ms. Agustina Wilujeng Pramestuti, MP**

Member of Committee for Inter-Parliamentary Cooperation

Vice Chair of Commission X (Education, Youth, Sport, Tourism, Arts and Culture Affairs)

The House of Representatives of the Republic of Indonesia

# ENHANCING WOMEN'S ROLE IN MAJOR PEACE PROCESS

Setting UNSCR 1325 as a guideline and standard to promote WPS Agenda

Exercising Parliament's function of legislative, budgeting and oversight, and ensuring government's policy focuses on increasing women's participation and representation in the prevention, management and resolution of conflict

Conducting parliamentary diplomacy to galvanize regional/ASEAN action





# STRATEGIES OF INDONESIA ON WPS

## INTERNATIONAL RESPONSES

Supporting UNSCR 1325 on Women, Peace and Security.

Supporting UNSCR 2538 on Women in Peacekeeping.

Initiated the establishment of the South East Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediators (SEANWPNM).

## NATIONAL ACTIONS

Indonesia is the 7<sup>th</sup> largest contributor of female peacekeepers in the world, and the largest in ASEAN.

As of May 2022, Indonesia contributes to at least 149 women peacekeepers serving in various UN Peace Missions.

NAP on the Protection and Empowerment of Women and Children in Social Conflict (NAP WPS) that contains prevention of conflict, resolutions and empowerment and participation programs.

Collaboration between National Human Rights Institutions and the national army, which encompasses briefing session on the promotion of human rights.

# STRENGTHENING COOPERATION AND COLLABORATION



The Indonesian Parliament Advocates

The adoption and implementation of the ASEAN Regional Plan of Action on Women, Peace and Security (RPA on WPS).

Preventing and resolving issues of human rights towards women in conflict areas through international and regional resolutions.

Adequate budgeting that focuses on enhancing the role and contribution of women in the prevention, management and resolution of conflict.

Education or curriculum on the promotion and protection of human rights to be integrated into all levels of education of the national army and police

Thank You



@bksapdpr



@bksapdprri



BKSAP DPRRI



BKSAP DPRRI



<http://ksap.dpr.go.id>





## The Roles of Parliaments in Promoting Gender-Responsive Recovery from the COVID-19 Pandemic

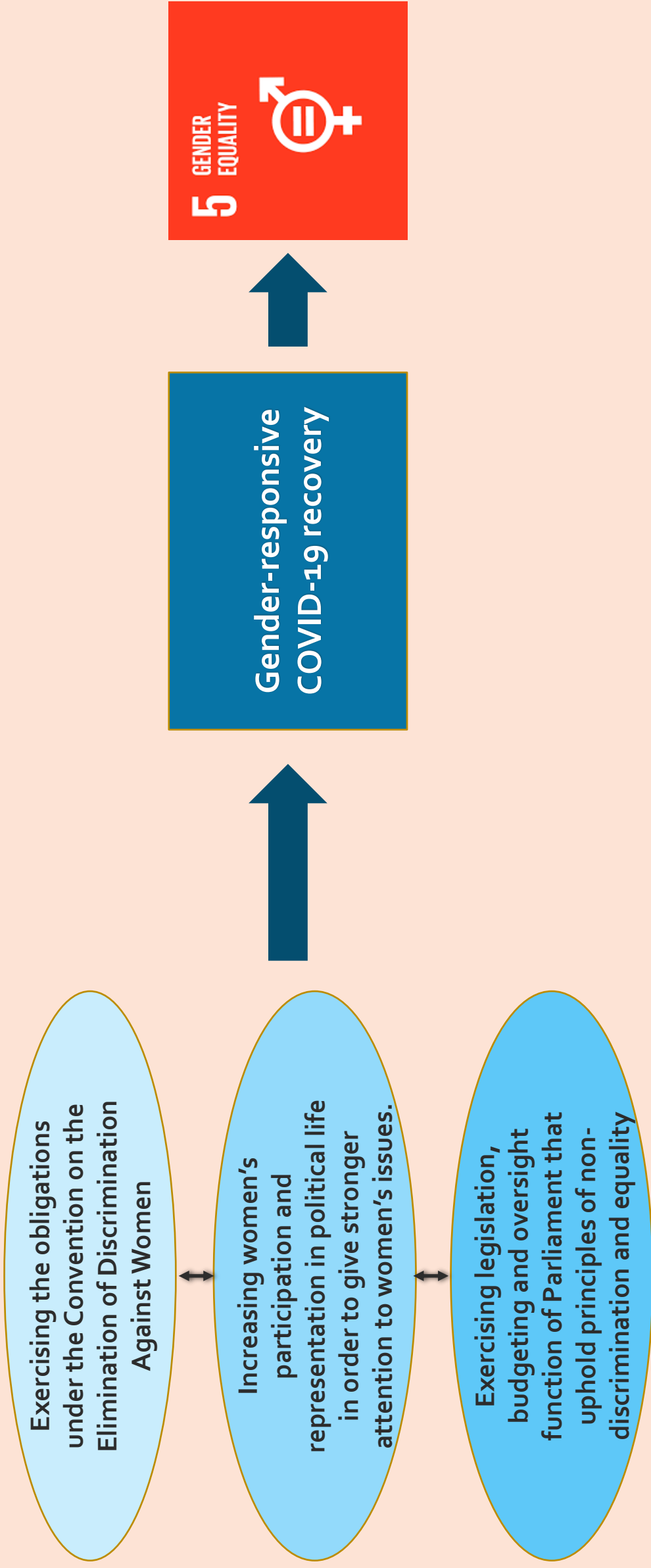


**Hon. Ms. Dyah Roro Esti Widya Putri, MP**

Member of Committee for Inter-Parliamentary Cooperation  
Member of Commission VII (Energy, Mineral Resources, Research and Technology, Environmental Affairs)

The House of Representatives of the Republic of Indonesia

# GENDER EQUALITY AND PARLIAMENT'S ROLE



# NATIONAL ECONOMIC RECOVERY STRATEGIES (PEN)

TOTAL BUDGET ALLOCATION: IDR 455.62 trillion

## ECONOMY

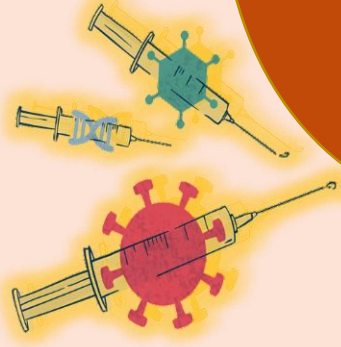
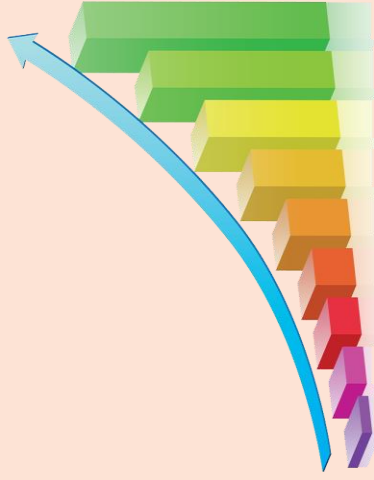
Business Credit  
Program for  
MSMEs

## HEALTH

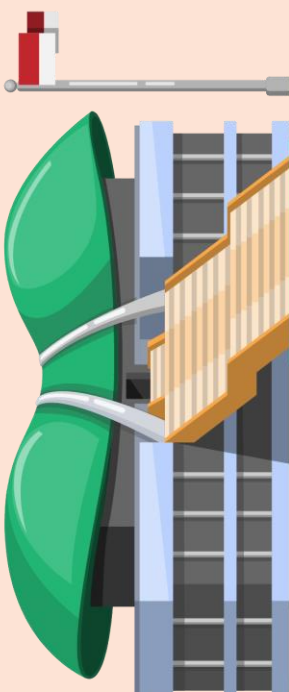
- Vaccination Program
- Incentives for Health Workers

## SOCIAL PROTECTION

- Pre-Employment Card
- Family Hope Program



# MOVING FORWARD: EFFECTIVE COOPERATION



The Indonesian House  
of Representatives  
Advocates

Adoption and implementation of ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) and Its implementation Plan

Implementation of Financial Intermediary Fund (FIF) to address the financing gap for pandemic Preparedness, Prevention and Response (PPR)

Resolving challenges encountered by women during the pandemic, including mental health and sexual and gender-based violence, through international and regional resolutions

Internal cooperation between the Committee and the Women's Caucus of the Indonesian Parliament (KPPRI) to enhance the role of women legislators in strategic positions



# Thank You



@bksapdpr



@bksapdprri



BKSAP DPRRI



BKSAP DPRRI



<http://ksap.dpr.go.id>



# Siaran Pers

Badan Kerja Sama Antar-  
Parlemen (BKSAP)  
DPR RI

*Sekretariat:*

Ged. Nusantara III, Lt. 4  
Jl. Jend. Gatot Subroto  
Jakarta 10270  
Indonesia

*Website:*

<http://ksap.dpr.go.id/>

*Twitter:*

[@bksapdpri](https://twitter.com/bksapdpri)

*Instagram:*

[@bksapdpri](https://www.instagram.com/bksapdpri)

*YouTube:*

[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAPDPRRI)

**BKSAP** adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemendan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Biro KSAP:  
021-5715814  
[biro\\_ksap@dpr.go.id](mailto:biro_ksap@dpr.go.id)

## DPR RI menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pemulihan COVID-19 dan Agenda WPS

**Phnom Penh, Cambodia** | Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI berpartisipasi aktif dalam Virtual Meeting of Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2022. Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin oleh Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP) dengan anggota BKSAP lainnya, yaitu Agustina Wilujeng Pramestuti (F-PDIP), Dyah Roro Esti Widya Puteri (F-PG), serta Ratih Megasari Singkarru (F-Nasdem).

Peran parlemen dalam mempromosikan pemulihan pandemi COVID-19 yang responsif akan gender, dan peran parlemen dalam memajukan agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS) dijadikan dua tema utama dan sesi pada pertemuan tersebut. Dalam hal ini, para delegasi BKSAP DPR RI kembali mendorong partisipasi dan keterwakilan perempuan untuk menciptakan kebijakan dan tindakan yang inklusif.

Hal tersebut ditekankan oleh Dyah Roro Esti dalam presentasinya di sesi pertama terkait pemulihan pandemi COVID-19. "Anggota parlemen perempuan memiliki peran yang menentukan dalam merumuskan kebijakan yang responsif akan gender. Penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang lebih banyak di parlemen mengarah pada perhatian yang lebih kuat terhadap isu-isu yang mempengaruhi perempuan." Politisi muda dari Partai Golkar ini juga menjelaskan program-program pemerintah seperti Kartu Pra-Kerja, dimana setidaknya 49% penerimanya adalah perempuan.

Pada diskusi sesi pertama, Irine Yusiana Roba Putri juga menyampaikan pendapatnya terkait isu kesehatan mental selama pandemi COVID-19: "Saya percaya kesehatan mental harus diintegrasikan di dalam langkah dan tindakan terkait kesehatan untuk pemulihan COVID-19. Para anggota parlemen juga harus memastikan, melalui fungsinya, bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah juga mementingkan prinsip-prinsip keterjangkauan dan aksesibilitas.", tegasnya.

Pada sesi kedua yang berfokus pada agenda WPS, Agustina Wilujeng dalam presentasinya menjabarkan bahwa perempuan mempunyai peran yang krusial dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia. "Sejalan dengan Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan UNSCR 1325, kita harus memastikan keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam mekanisme pencegahan, pengelolaan, dan resolusi konflik, termasuk peran mereka untuk berkontribusi dalam mengatasi kebutuhan perempuan selama repatriasi, rehabilitasi, reintegrasi dan rekonstruksi pasca konflik; dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia." Ujar politisi PDIP tersebut.



# Dokumentasi Kegiatan









**Badan Kerja Sama Antar Parlemen  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Gedung Nusantara III, Lantai 6, Komplek MPR/ DPR/ DPD RI  
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

Telp. : 021-5715842

Faks. : 021-5752132

Email : [ksr.bksapdpr@gmail.com](mailto:ksr.bksapdpr@gmail.com) | [opr.bksap@yahoo.com](mailto:opr.bksap@yahoo.com)



@bksapdpr



@bksapdpri



BKSAP DPRRI



BKSAP DPRRI



<http://ksap.dpr.go.id>